

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

“Pemisahan kepemilikan antara prinsipal dan manajemen perusahaan oleh agen dapat menyebabkan konflik keagenan. Konsep teori agensi adalah hubungan antara prinsipal dengan agen. Pemegang saham (*principal*) menyerahkan tugas dan tanggung jawab operasional kepada manajer (*agent*) dan manajer diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut secara maksimal supaya didapatkan hasil berupa optimalnya tingkat laba. Perusahaan yang memiliki modal terdiri dari saham, pemegang saham bertindak sebagai pelaku, dan *CEO* sebagai agen. Teori agensi mengasumsikan bahwa setiap individu termotivasi untuk memenuhi kepentingan masing-masing, sehingga menyebabkan konflik antara prinsipal dan agen perusahaan. Prinsipal termotivasi untuk menyejahterakan kepentingan pribadi dengan meningkatkan keuntungan. Agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologis, seperti memperoleh investasi, pinjaman dan kontrak” (Anthony & Govindarajan, 2006 dalam Anindya dan Yuyetta, 2020). “Hubungan antara prinsipal dengan agen sering kali ditentukan oleh angka akuntansi. Hal ini mendorong agen untuk mengelola angka agar sesuai dengan tujuan prinsipal dan masih mendapatkan keuntungan. Salah satu bentuk tindakan keagenan adalah manajemen laba” (Watts & Zimmerman, 1986 dalam Anindya dan Yuyetta, 2020).

Dengan adanya tuntutan tinggi dari pemilik agar perusahaannya terus berkembang, maka manajer juga berharap memperoleh insentif yang lebih besar untuk mewujudkan keinginan pemilik tersebut. Selain itu, sebagaimana telah dijelaskan diawal bahwa terdapat kontrak perjanjian dalam hubungan keagenan, mengakibatkan manajer secara moral harus bertanggungjawab memberikan hasil

keuntungan yang maksimal dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak yang disepakati

Menurut Eisenhardt (1989) dalam Lestari dan Murtanto (2017), mengemukakan bahwa “teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia, adapun tiga asumsi sifat manusia itu adalah:

1. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia cenderung mementingkan diri sendiri (*self-interest*).
2. Manusia memiliki batas daya pemikiran sehingga tidak berpikir panjang untuk masa mendatang (*bounded rationally*).
3. Kemudian manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Berdasarkan ketiga asumsi diatas, dijelaskan bahwa setiap individu mementingkan dirinya sendiri sehingga dapat menyebabkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan meningkat”. “Hubungan keagenan dapat menimbulkan konflik kepentingan karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*)” (Almalita, 2017). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Alexander dan Palupi (2020), “cara untuk mengurangi masalah keagenan ini, dapat menimbulkan biaya keagenan, yakni:

1. *Monitoring cost*

Monitoring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku agen.

2. *Bonding cost*

Bonding Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk agen agar dapat berperilaku untuk kepentingan prinsipal dengan cara memberikan kompensasi bagi agen yang berperilaku demi kepentingan prinsipal.

3. *Residual loss*

Residual Loss adalah kerugian yang diterima oleh prinsipal karena agen tetap tidak berperilaku demi kepentingan prinsipal walaupun biaya-biaya yang lain telah dikeluarkan”.

“Dalam hal pertimbangan oportunistik, manajemen dapat melakukan penyembunyian, penundaan pengungkapan atau pengubahan informasi yang akan diberikan kepada pihak eksternal. Hal ini menyebabkan pihak eksternal memperoleh informasi yang tidak lengkap atau bahkan tidak relevan dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya, dan dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak tepat. Keadaan ini dikenal sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi adalah situasi yang terbentuk ketika pemilik tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja keuangan manajemen, sehingga pemilik tidak mengetahui secara pasti bagaimana usaha manajemen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan (Wiryadi & Sebrina, 2013 dalam Pratiwi dan Diana, 2018). Dimana dalam situasi seperti ini dimanfaatkan manajer untuk melakukan manajemen laba, dimana dalam hal ini manajemen melakukan tindakan yang menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan.

“Laba bersih mencerminkan kinerja manajer, dan mengukur seberapa besar usaha yang telah dilakukan manajer dalam menjalankan perusahaan” (Scott, 2011:423 dalam Adryanti, 2019). “Hal tersebut membuat manajemen berusaha untuk melakukan manajemen laba agar kinerja perusahaan tampak baik oleh pihak eksternal” (Adryanti, 2019). “Manajemen laba juga dapat menjadi sebuah strategi manajer untuk memperlancar kompensasi mereka” (Adryanti, 2019). Fahren dan Afri (2017) dalam Chelindiva dan Osesoga (2020), mengatakan bahwa “masalah agensi tercipta karena adanya pemisahan antara pemilik kekayaan dengan pengelola perusahaan sehingga dapat menimbulkan asimetri informasi, selain itu manajer memiliki fleksibilitas untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan dan atau nilai pasar

perusahaan. Karena fleksibilitas tersebut, maka timbul kemampuan untuk memanipulasi pilihan yang tersedia dan membuat pilihan yang dianggap paling tepat sehingga perusahaan mencapai tingkat pendapatan yang diinginkan. Hal inilah yang melatari tindakan manajemen laba”.

2.2 Teori Akuntansi Positif

“Kebebasan manajer menentukan kebijakan dan menyeleksi teknik akuntansi yang digunakan sehingga dapat menimbulkan perilaku oportunistik sehingga dapat mempermudah manajer untuk mencapai tujuannya, motivasi manajer untuk melakukan tindakan oportunitis dapat dikaitkan dengan *Positive Accounting Theory*” (Anindya dan Yuyetta, 2020). “Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses, yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang” (Dewi dan Wirawati, 2019). “Dalam teori ini, menjelaskan (*to explain*) artinya memberikan alasan-alasan terhadap praktik manajemen laba melalui efisiensi penegelolaan informasi laba yang dilakukan manajer. Kemudian, memprediksi (*to predict*) artinya mengamati dan memprediksi kondisi kapan manajer akan melakukan praktik manajemen laba melalui efisiensi pengelolaan informasi laba dengan memanfaatkan celah-celah yang ada” (Kabir, 2002 dalam Anindya dan Yuyetta, 2020).

Menurut Sulistyanto (2018), “tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif, yaitu:

a. *Hypothesis Plan Bonus*

Dalam bonus atau kompensasi manajerial, pemilik perusahaan berjanji bahwa manajer akan menerima sejumlah bonus jika kinerja perusahaan mencapai jumlah tertentu. Janji bonus inilah yang merupakan alasan bagi

manajer untuk mengelola dan mengatur labanya pada tingkat tertentu sesuai dengan yang disyaratkan agar dapat menerima bonus.

b. *Debt (Equity) Hypothesis*

Dalam konteks perjanjian utang, manajer akan mengelola dan mengatur laba agar kewajiban hutang yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Hal ini merupakan upaya manajer untuk mengelola dan mengatur jumlah laba yang merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya. Manajer akan melakukan pengelolaan dan pengaturan jumlah laba untuk menunda bebannya pada periode bersangkutan dan akan diselesaikannya pada periode-periode mendatang.

c. *Political Cost Hypothesis*

Besar kecilnya pajak yang akan ditarik oleh pemerintah sangat tergantung pada besar kecilnya laba yang dicapai perusahaan. Perusahaan yang memperoleh laba lebih besar akan ditarik pajak yang lebih besar pula dan perusahaan yang memperoleh laba kecil akan ditarik pajak yang lebih kecil pula. Kondisi inilah yang membuat manajer untuk mengelola dan mengatur labanya dalam jumlah tertentu agar pajak yang harus dibayarkan menjadi tidak terlalu tinggi, karena manajer sebagai pengelola, tentu tidak ingin kewajiban yang harus diselesaikannya terlalu membebannya”.

“Ketiga hipotesis ini yang secara implisit mengakui tiga bentuk keagenan, yaitu antara pemilik dengan manajemen, antara kreditor dengan manajemen, dan antara pemerintah dengan manajemen. Sehingga secara luas, prinsipal bukan hanya pemilik perusahaan, tetapi juga bisa berupa pemegang saham, kreditur, maupun pemerintah. Dari ketiga hipotesis tersebut, *leverage* dapat dijelaskan dengan hipotesis *Debt to Equity Hypothesis*, dikarenakan semakin besarnya rasio hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka semakin besar kecenderungan manajer untuk memilih prosedur akuntansi tertentu agar terjadinya perubahan laba

yang dilaporkan, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran kontrak yang telah disepakati” (Dewi dan Wirawati, 2019).

“Teori akuntansi positif mengungkapkan bahwa manajer mempunyai kuasa atau fleksibilitas untuk memilih prosedur akuntansi yang sesuai dengan prosedur pilihannya. Hal ini menjadikan manajer bisa memilih prosedur yang dapat meningkatkan laba ataupun menurunkan laba untuk memodifikasi laporan keuangan, ataupun untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tindakan manajer dalam memanipulasi laporan keuangan ini biasanya disebut sebagai manajemen laba” (Ramadhan, 2017 dalam Maslihah, 2019).

2.3 Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

- (a) aset;
- (b) liabilitas;
- (c) ekuitas;
- (d) penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian;
- (e) kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan
- (f) arus kas.

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan entitas dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya arus kas masa depan”.

Menurut Weygandt *et al.*, (2019), “penggunaan laporan keuangan terbagi menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Pengguna internal

Adalah pihak-pihak yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan bisnis dalam perusahaan. Berikut merupakan pengguna internal perusahaan, yaitu bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian sumber daya manusia dan manajemen.

2. Pengguna Eksternal

Adalah individu dan organisasi di luar perusahaan yang membutuhkan informasi mengenai perusahaan berikut merupakan pihak eksternal dari perusahaan. Dua jenis pengguna eksternal yang paling umum adalah investor dan kreditor. Investor (pemilik) menggunakan informasi akuntansi untuk memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual saham kepemilikan suatu perusahaan. Kreditor (seperti pemasok dan *bankers*) menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi risiko pemberian kredit atau meminjamkan uang”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), “laporan keuangan lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya, dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan

akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan”.

1) Laporan Posisi Keuangan pada Akhir Periode

“Laporan posisi keuangan melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari sebuah perusahaan bisnis pada tanggal tertentu” (Weygandt *et al.*, 2019).

“Laporan posisi keuangan mencakup penyajian jumlah pos-pos aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, aset keuangan, investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, aset biologis, persediaan, piutang usaha dan piutang lain, kas dan setara kas, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, utang usaha dan utang lain, provisi, liabilitas keuangan, liabilitas dan aset untuk pajak kini, liabilitas dan aset pajak tangguhan, liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, kepentingan non pengendali, dan modal saham dan cadangan” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Selama Periode

“Laporan laba rugi mengungkapkan jumlah pendapatan dan beban pada tahun berjalan sehingga menghasilkan bersih (*net income*) atau rugi bersih (*net loss*). Sedangkan, penghasilan komprehensif lain mengungkapkan jumlah keuntungan dan kerugian yang dikeluarkan sebagai komponen perhitungan laba rugi” (Weygandt *et al.*, 2019). Komponen dari laporan laba rugi yaitu:

- a. “Bagian penjualan atau pendapatan. Menyajikan penjualan, diskon, *allowances*, pengembalian, dan informasi lain yang berkaitan.
- b. “Bagian harga pokok penjualan. Menunjukkan harga pokok penjualan untuk menghasilkan penjualan.”
- c. “Laba kotor. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan.”

- d. “Beban penjualan. Melaporkan beban-beban yang dihasilkan dari usaha perusahaan dalam membuat penjualan.”
- e. “Beban administrasi dan umum. Melaporkan beban dari administrasi umum.”
- f. “Pendapatan dan beban lain. Berisi hampir semua transaksi lain yang tidak cocok dengan pendapatan dan beban dari kategori di atas. Item seperti keuntungan atau kerugian dari penjualan aset berumur panjang, penurunan nilai aset, dan biaya restrukturisasi dilaporkan di bagian ini. Sebagai tambahan, pendapatan seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan bunga sering dilaporkan.”
- g. “Laba dari operasi. Hasil perusahaan dari operasional normal.”
- h. “Biaya pendanaan. Sebuah item terpisah yang mengidentifikasi biaya pendanaan dari perusahaan, selanjutnya disebut sebagai beban bunga.”
- i. “Laba sebelum pajak penghasilan. Jumlah pendapatan sebelum pajak penghasilan.”
- j. “Pajak penghasilan. Bagian pendek yang melaporkan pajak yang dipungut atas laba sebelum pajak penghasilan.”
- k. “Laba dari operasi berkelanjutan. Hasil perusahaan sebelum keuntungan atau kerugian atas operasi yang dihentikan. Jika perusahaan tidak memiliki keuntungan atau kerugian atas operasi yang dihentikan, bagian ini tidak dilaporkan dan jumlah ini dilaporkan sebagai laba bersih.”
- l. “Operasi yang dihentikan. Keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari disposisi suatu komponen dari perusahaan.”
- m. “Laba bersih. Hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu.

- n. “Kepentingan non pengendali. Menyajikan alokasi laba bersih ke pemegang saham pengendali dan ke kepentingan non pengendali (juga disebut sebagai kepentingan minoritas).”
- o. “Laba per saham. Per jumlah saham yang dilaporkan.” (Kieso *et al.*, 2018)

3) Laporan Perubahan Ekuitas

“Laporan perubahan ekuitas mencakup informasi sebagai berikut:

- (a) total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk dan kepada kepentingan non pengendali;
- (b) untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan;
- (c) untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara tersendiri mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari:
 - (i) laba rugi;
 - (ii) penghasilan komprehensif lain; dan
 - (iii) transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

4) Laporan Arus Kas

“Laporan keuangan yang merangkum informasi tentang arus kas masuk (penerimaan) arus kas keluar (pembayaran) untuk jangka waktu tertentu” (Weygandt *et al.*, 2019). “Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan lain, maka laporan arus kas dapat menyediakan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset neto

entitas, struktur keuangannya (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuannya untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai kini arus kas masa depan dari berbagai entitas. Informasi tersebut juga meningkatkan keterbandingan pelaporan kinerja operasi berbagai entitas karena dapat meniadakan dampak penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

“Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Entitas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Klasifikasi arus kas berdasarkan aktivitas menyediakan informasi yang memungkinkan pengguna untuk menilai dampak aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan entitas serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi ini dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

“Jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasi adalah indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas telah menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa bantuan sumber pendanaan dari luar. Informasi tentang komponen spesifik atas arus kas operasi historis adalah berguna, dalam hubungannya dengan informasi lain, dalam memprakirakan arus kas operasi masa depan. Arus kas dari aktivitas operasi diperoleh terutama dari aktivitas utama penghasil pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut umumnya dihasilkan

dari transaksi dan peristiwa lain yang memengaruhi penetapan laba rugi” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

“Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas investasi adalah penting karena arus kas tersebut merepresentasikan sejauh mana pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang diintensikan untuk menghasilkan penghasilan dan arus kas masa depan. Hanya pengeluaran yang menghasilkan pengakuan atas aset dalam laporan posisi keuangan yang memenuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Pengungkapan terpisah atas arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan penting karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

“Catatan atas laporan keuangan umumnya memperkuat atau menjelaskan item-item yang disajikan dalam badan utama laporan keuangan. Jika badan utama dari laporan keuangan memberikan gambaran tidak lengkap dari performa dan posisi dari perusahaan, catatan sebaiknya memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan” (Kieso *et al.*, 2018). “Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

6) Informasi Komparatif Mengenai Periode Terdekat Sebelumnya

Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau diisyaratkan lain oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk

pemahaman laporan keuangan periode berjalan” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

“Entitas menyajikan, minimal, dua laporan posisi keuangan, dua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dua laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), dua laporan arus kas, dan dua laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan terkait. Entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan SAK, sepanjang informasi tersebut disiapkan sesuai dengan SAK. Informasi komparatif dapat terdiri atas satu atau lebih laporan yang dirujuk, tetapi tidak harus terdiri dari laporan keuangan lengkap. Ketika kasus ini terjadi, entitas menyajikan informasi catatan atas laporan keuangan yang terkait untuk laporan tambahan tersebut” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

7) Laporan Posisi Keuangan pada Awal Periode Terdekat Sebelumnya Ketika Entitas Menerapkan suatu Kebijakan Akuntansi secara Retrospektif atau Membuat Penyajian Kembali Pos-Pos Laporan Keuangan

“Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum jika:

- (a) entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan; dan
- (b) penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif, atau reklasifikasi yang memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Entitas menyajikan tiga laporan posisi keuangan pada akhir periode berjalan, akhir periode terdekat sebelumnya, dan awal periode terdekat sebelumnya” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

“Tanggal laporan posisi keuangan awal adalah tanggal awal periode terdekat sebelumnya terlepas apakah laporan keuangan entitas menyajikan informasi komparatif untuk periode yang lebih awal. Jika entitas mengubah penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangannya, maka entitas mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis untuk dilakukan. Jika entitas mereklasifikasi jumlah komparatif, maka entitas mengungkapkan (termasuk pada awal periode terdekat sebelumnya)

- (a) sifat reklasifikasi;
- (b) jumlah setiap pos atau kelas pos yang direklasifikasi; dan
- (c) alasan reklasifikasi.

Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis untuk dilakukan, maka entitas mengungkapkan:

- (a) alasan tidak mereklasifikasi jumlah tersebut, dan
- (b) sifat penyesuaian yang seharusnya akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

“Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Ketika akuntansi berdasarkan akrual digunakan, entitas mengakui pos-pos sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika pospos tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur-unsur tersebut dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Adapun dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018), “agar informasi keuangan menjadi berguna, informasi tersebut harus relevan dan merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan. Kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika

informasi tersebut terbanding (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan terpahami (*understandable*).

1) Relevansi

“Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi mungkin membuat perbedaan dalam keputusan bahkan jika sebagian pengguna memilih untuk tidak mengambil keuntungan atas informasi tersebut atau telah menyadari informasi tersebut dari sumber lainnya. Informasi keuangan memiliki nilai prediktif jika informasi tersebut dapat digunakan sebagai input yang digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil (*outcome*) masa depan. Informasi keuangan memiliki nilai konfirmatori jika menyediakan umpan balik (mengkonfirmasi atau mengubah) tentang evaluasi sebelumnya. Nilai prediktif dan nilai konfirmatori informasi keuangan memiliki hubungan yang saling terkait. Informasi yang memiliki nilai prediktif sering juga memiliki nilai konfirmatori” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

2) Materialitas

“Informasi adalah material jika penghilangan atau salah saji informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat pengguna yang berdasarkan atas informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu. Dengan kata lain, materialitas adalah aspek relevansi yang spesifik untuk suatu entitas tertentu berdasarkan sifat atau besarnya, atau keduanya, dari pos-pos dimana informasi tersebut berhubungan dalam konteks laporan keuangan masing-masing entitas” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

3) Representasi Tepat

“Laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomik dalam kata dan angka. Agar dapat menjadi informasi yang berguna, selain merepresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus

merepresentasikan secara tepat fenomena yang akan direpresentasikan” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

4) Penerapan Karakteristik Kualitatif Fundamental

“Informasi harus relevan dan juga direpresentasikan secara tepat untuk disebut sebagai informasi yang berguna. Representasi tepat dari fenomena yang tidak relevan atau representasi tidak tepat dari fenomena yang relevan tidak akan membantu pengguna untuk membuat keputusan yang baik. Proses yang paling efisien dan efektif dalam penerapan karakteristik kualitatif fundamental biasanya adalah sebagai berikut. Pertama, identifikasi fenomena ekonomi yang memiliki potensi menjadi berguna bagi pengguna informasi keuangan entitas pelapor. Kedua, identifikasi jenis informasi tentang fenomena yang paling relevan jika informasi tersebut tersedia dan dapat dipresentasikan secara tepat. Ketiga, menentukan apakah informasi tersebut tersedia dan dapat direpresentasikan secara tepat” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

5) Karakteristik Kualitatif Peningkat

“Keterbandingan, keterverifikasian, ketepatanwaktuan, dan keterpahaman adalah karakteristik kualitatif yang meningkatkan kegunaan informasi yang relevan dan direpresentasikan secara tepat. Karakteristik kualitatif peningkat juga dapat membantu dalam menentukan mana diantara dua cara yang harus digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena jika keduanya dianggap sama-sama relevan dan direpresentasikan secara tepat” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

6) Keterbandingan

“Keterbandingan adalah karakteristik kualitatif yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dalam, dan perbedaan antara, pos-pos” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

7) Keterverifikasian

“Keterverifikasian membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi mempresentasikan fenomena ekonomik secara tepat sebagaimana mestinya. Keterverifikasian berarti bahwa berbagai pengamat independen dengan pengetahuan berbeda-beda dapat mencapai konsensus, meskipun tidak selalu mencapai kesepakatan, bahwa penggambaran tertentu merupakan representasi tepat” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

8) Ketepatanwaktuan

“Ketepatanwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Secara umum, semakin lawas suatu informasi maka semakin kurang berguna informasi tersebut. Akan tetapi, beberapa informasi dapat terus tepat waktu bahkan dalam jangka panjang setelah akhir dari periode pelaporan, misalnya, beberapa pengguna perlu mengidentifikasi dan menilai tren” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

9) Keterpahaman

“Pengklasifikasian, pengarakteristikan dan penyajian informasi secara jelas dan ringkas dapat membuat informasi tersebut terpaham. Laporan keuangan disiapkan untuk pengguna yang memiliki pengetahuan memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi serta pengguna yang meninjau dan menganalisa informasi dengan tekun” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

10) Penerapan Karakteristik Kualitatif Peningkat

“Karakteristik kualitatif peningkat harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Akan tetapi, karakteristik kualitatif peningkat, baik secara individu atau kelompok, tidak dapat membuat informasi menjadi berguna bila informasi tersebut tidak relevan atau tidak terepresentasikan secara tepat. Penerapan karakteristik kualitatif peningkat merupakan sebuah proses yang berulang yang tidak mengikuti urutan tertentu” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

2.4 Laba

Menurut Weygandt *et al.*, (2019), “*net income* (laba bersih) terjadi ketika pendapatan melebihi beban. Sedangkan ketika beban melebihi pendapatan, akan menghasilkan *net loss* (rugi bersih)”. “Laba rugi adalah total penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen penghasilan komprehensif lain” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Menurut Subramanyam (2017), “ada dua komponen utama dalam laba, yaitu:

1. *Revenues and Gains*

Pendapatan adalah arus kas masuk yang diperoleh atau yang akan diperoleh berasal dari kegiatan usaha perusahaan yang sedang berlangsung. Termasuk penjualan tunai dan penjualan kredit. Keuntungan adalah arus kas masuk yang diperoleh atau yang akan diperoleh berasal dari transaksi dan kejadian yang tidak terkait dengan aktivitas usaha perusahaan yang sedang berlangsung.

2. *Expenses and losses*

Beban adalah arus kas keluar yang terjadi, arus kas keluar yang akan terjadi atau alokasi kas keluar masa lalu yang berasal dari kegiatan usaha perusahaan yang sedang berlangsung. Kerugian adalah penurunan aset perusahaan yang berasal dari aktivitas sampingan atau insidental perusahaan”.

Dalam laporan laba rugi perusahaan terdapat beberapa komponen yang harus disajikan oleh perusahaan, salah satunya adalah laba. Menurut Kieso *et al.*, (2018), terdapat berbagai jenis laba, antara lain:

1) *Gross profit* (laba kotor)

“*Gross profit is computed by deducting cost of goods sold from net sales*”, artinya “laba kotor dihitung dengan mengurangi harga pokok penjualan dari penjualan bersih”. “*The reporting of gross profit provides a useful*

number for evaluating performance and predicting future earnings”, artinya “pelaporan laba kotor memberikan angka yang berguna untuk mengevaluasi performa dan memprediksi laba di masa depan”. “*Statement readers may study the trend in gross profits to understand how competitive pressure affected profit margin*”, artinya “pembaca laporan bisa mempelajari tren laba kotor untuk mengerti bagaimana tekanan kompetitif mempengaruhi margin profit” (Kieso *et al.*, 2018).

2) *Income from operations* (laba operasi)

Income from operations atau laba operasi adalah “*company’s results from normal operations*”, artinya “hasil perusahaan dari operasi normal”. Ditentukan dengan “*deducting selling and administrative expense as well as other income and expense from gross profit*”, artinya “mengurangi beban penjualan dan administrasi dan juga pendapatan dan beban lain dari laba kotor”. “*Income from operations highlights items that affect regular business activities, often used by analysts in helping to predict the amount, timing, and uncertainty of future cash flows*”, artinya “laba operasi menyoroti pos-pos yang mempengaruhi aktivitas bisnis biasa, sering digunakan oleh analis dalam membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan”. “*In general, the IASB takes the position that both revenues and expenses and other income and expense should be reported as part of income from operations*”, artinya “secara umum, IASB beranggapan bahwa baik pendapatan dan beban serta pendapatan dan beban lain harus dilaporkan sebagai bagian dari laba operasi” (Kieso *et al.*, 2018).

3) *Income before income tax* (Laba Sebelum Pajak)

Income before income tax atau laba sebelum pajak dapat dihitung dengan “*deducting interest expense (often referred to as financing costs) from income from operations*”, artinya “mengurangi beban bunga (sering disebut sebagai beban keuangan) dari laba operasi” (Kieso *et al.*, 2018).

4) *Net income* (laba bersih)

Net income atau laba bersih adalah “*the net results of the company’s performance over a period of time*”, artinya “hasil bersih performa perusahaan selama periode waktu tertentu”. Diperoleh dengan “*deducts income tax from income before income tax*”, artinya “mengurangi pajak penghasilan dari laba sebelum pajak penghasilan”. “*Net income represents the income after all revenues and expenses for the period are considered, it is viewed by many as the most important measure of a company’s success or failure for a given period of time*”, artinya “laba bersih menggambarkan penghasilan setelah semua pendapatan dan beban untuk periode tersebut telah diperhitungkan, laba bersih dilihat sebagai ukuran yang paling penting dari kesuksesan atau kegagalan untuk periode waktu tertentu” (Kieso *et al.*, 2018).

2.5 Akrual

Menurut Weygandt *et al.*, (2019), “*accrual basis* atau akuntansi berbasis akrual adalah perusahaan mencatat transaksi yang mengubah laporan keuangan perusahaan pada periode terjadinya peristiwa tersebut”. Misalnya, menggunakan dasar akrual untuk menentukan laba bersih berarti perusahaan mengakui pendapatan ketika mereka melakukan jasa (bukan ketika mereka menerima uang tunai). Itu juga berarti mengakui biaya saat terjadi (bukan saat dibayar).

“Untuk mengakui biaya yang sudah menjadi kewajiban maka perusahaan tidak perlu memperhatikan waktu dan pengeluaran kas. Artinya biaya dapat diakui pada periode tertentu walau pengeluaran kas telah terjadi pada periode sebelumnya. Atau sebaliknya biaya baru akan diakui periode yang akan datang meski pengeluaran kas telah dilakukan periode sebelumnya. Selain itu perusahaan juga bisa biaya yang merupakan komponen alokasi harga pokok aktiva yang dimilikinya, pada saat barang terjual. Sebaliknya metode pencatatan ini membuat perusahaan dapat menunda pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan

periode berikutnya, meskipun kas telah diterima. Artinya, perusahaan dapat mengakui pendapatan pada periode tertentu walaupun kas baru akan diterima pada periode yang akan datang. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai *account* akrual dalam laporan keuangan, misalkan piutang dagang, pendapatan diterima dimuka, hutang biaya, biaya depresiasi, dan biaya dikeluarkan dimuka, biaya cadangan, biaya depresiasi, dan lain-lain. Secara konseptual laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan basis akrual dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan komprehensif dibandingkan laporan keuangan yang menggunakan basis kas. Alasannya, dalam akuntansi berbasis akrual semua transaksi dan peristiwa yang dilakukan perusahaan selama satu periode tertentu, baik kas maupun nonkas. Inilah yang membuat laporan keuangan lebih relevan dengan kebutuhan pemakai informasi ini dibandingkan dengan laporan keuangan basis kas” (Sulistiyanto, 2018).

Terdiri dari dua jenis, yaitu *discretionary accruals* dan *non-discretionary accruals*. “*Discretionary accruals* merupakan komponen akrual yang dapat diatur dan direayasa sesuai kebijakan (*discretion*) manajerial, sehingga laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak mencerminkan nilai atau kondisi perusahaan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena manajemen memiliki kemampuan untuk mengontrol komponen ini dalam jangka pendek. Komponen *discretionary accruals* di antaranya terdiri dari penilaian piutang, pengakuan biaya garansi (*future warranty expense*) dan kapitalisasi aset (*capitalization assets*). Sedangkan komponen *non-discretionary accruals* adalah pengakuan akrual laba yang wajar, yang tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum” (Kusumaningtyas, 2012 dalam Pratiwi dan Diana, 2018). “Contoh dari *discretionary accruals* adalah pembentukan cadangan kerugian piutang pada periode berjalan yang relatif lebih besar atau lebih kecil pada periode sebelumnya, sehingga akan lebih mencerminkan laba yang ingin dicapai perusahaan pada periode berjalan” (Erawan dan Ulupui, 2013 dalam Pratiwi dan

Diana, 2018). “*Non-discretionary accruals* merupakan akrual yang wajar, dan apabila dilanggar akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan (tidak wajar). Komponen *non-discretionary accruals* adalah pengakuan akrual laba yang wajar, yang tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum” (Kusumaningtyas, 2012 dalam Pratiwi dan Diana, 2018).

2.6 Manajemen Laba

Menurut Davidson, *et al.*, (1987) dalam Sulistyanto (2018), “*earnings management is the process of taking deliberate steps within the constraints of generally accepted accounting principles to bring about desired level of reported earnings*”, artinya “manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan”. “Manajemen laba adalah intervensi manajemen dalam proses tersebut membuat laporan keuangan dengan tujuan menguntungkan perusahaan. Pengelolaan fleksibilitas dalam menyusun laporan keuangan diatur dalam PSAK No. 1 tentang penyajian laporan keuangan dengan pendekatan atau basis akrual” (Amanda dan Febrianti, 2015 dalam Chelindiva dan Osesoga, 2020). “Perusahaan memiliki berbagai macam pilihan untuk melakukan manajemen laba. Metode-metode yang umum dipakai melibatkan perubahan asumsi standarstandar akuntansi. Kondisi ini sebagian besar muncul dari fleksibilitas yang diijinkan dalam prinsip akuntansi berterima umum” (Kurniawansyah, 2017).

Menurut Scott (2012:425) dalam Pratiwi dan Diana (2018), “pola manajemen laba terbagi menjadi empat macam:

a. *Taking a bath*

Taking a bath adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat ekstrim rendah (bahkan rugi) dibandingkan dengan laba pada periode sebelumnya

atau sesudahnya. Dalam pola ini, manajemen mengakui biaya-biaya periode yang akan datang dan kerugian pada periode berjalan. Periode yang dipilih biasanya ketika perusahaan memiliki kinerja kurang baik (seringkali ketika resesi, di mana perusahaan lain juga melaporkan kerugian).

b. *Income Minimization*

Income minimization adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba di laporan keuangan periode berjalan lebih rendah daripada laba sebenarnya. *Income minimization* biasanya dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapat perhatian secara politis.

c. *Income Maximization*

Income maximization adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba di laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi daripada laba sebenarnya. Pola ini dilakukan dengan cara mempercepat pencatatan pendapatan, menunda biaya atau memindahkan biaya untuk periode lain. “Sebagai contoh adalah dengan mengubah estimasi usia ekonomis aktiva tetap menjadi lebih besar dan mengganti metode depresiasinya menjadi garis lurus, mengecilkan presentase biaya kerugian piutang, mengganti metode pengakuan persediaan menjadi *FIFO (First In First Out)*, dan lain-lain” (Sulistyanto, 2018).

d. *Income Smoothing*

Income smoothing adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara membuat laba akuntansi relatif konsisten (rata atau *smooth*) dari periode ke periode. Dalam hal ini, manajemen dengan sengaja menurunkan atau meningkatkan laba untuk mengurangi fluktuasi dalam pelaporan laba, sehingga perusahaan terlihat stabil atau tidak berisiko tinggi, serta bonus yang didapatkan manajemen relatif konstan”.

“Secara umum ada beberapa motivasi-motivasi yang mendorong manajer untuk berperilaku oportunistik, yaitu motivasi bonus (*bonus purposes*), motivasi kontrak (*contractual motivations*), motivasi politik (*political motivations*), motivasi pajak (*taxes motivations*), pergantian *chief executive officers* (*changes of CEO*), *initial public offerings* dan mengkomunikasikan informasi ke investor (*to communicate information to investors*)” (Sulistiyanto, 2018).

Sedangkan menurut Subramanyam (2017), “motivasi manajemen laba di antaranya adalah:

1. Insentif Perjanjian

Banyak perjanjian yang menggunakan angka akuntansi sebagai indikator pengukuran, misalnya perjanjian kompensasi manajemen. Perjanjian kompensasi biasanya berupa bonus yang didasarkan pada laba. Dalam perjanjian bonus ditentukan batas atas dan batas bawah. Manajemen tidak akan mendapatkan bonus apabila laba yang dicapai melebihi batas bawah maupun batas atas. Hal ini mendorong manajemen untuk meningkatkan atau mengurangi laba berdasarkan batas atas dan batas bawah tersebut agar manajemen cenderung akan selalu memperoleh bonus dari suatu periode ke periode berikutnya.

2. Dampak Harga Saham

Manajemen dapat meningkatkan laba untuk menaikkan sementara harga saham perusahaan selama suatu kejadian tertentu seperti *merger*, penawaran surat berharga, penjualan saham, atau opsi. Manajemen juga dapat melakukan perataan laba untuk menurunkan persepsi pasar akan risiko.

3. Insentif Lain

Laba seringkali diturunkan untuk menghindari biaya politik dan memperoleh keuntungan dari pemerintah, misalnya subsidi atau menghindari biaya pajak yang terlalu tinggi”.

Menurut Azhari (2015) dalam Saragih (2017), “manajemen laba dapat dilakukan dengan tiga teknik, yaitu:

1. Perubahan metode akuntansi
 - a. Mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode jumlah angka tahun (*sum of the year digit*) ke metode depresiasi garis lurus (*straight line*)
 - b. Mengubah periode depresiasi
2. Memainkan kebijakan perkiraan akuntansi
 - a. Kebijakan mengenai perkiraan jumlah piutang tidak tertagih
 - b. Kebijakan mengenai perkiraan biaya garansi
 - c. Kebijakan mengenai perkiraan terhadap proses pengadilan yang belum terputuskan.
3. Menggeser periode biaya atau pendapatan
 - a. Mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya.
 - b. Mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya.
 - c. Kerjasama dengan vendor untuk mempercepat atau menunda pengiriman tagihan sampai periode akuntansi berikutnya.
 - d. Menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba.
 - e. Mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak terpakai”.

Teknik-teknik manajemen laba tersebut dapat dilakukan mengingat Standar Akuntansi Keuangan memberikan berbagai pilihan dalam mencatat berbagai peristiwa keuangan. Sepanjang tidak melanggar Standar Akuntansi Keuangan, manajemen perusahaan memiliki keleluasaan untuk mengganti suatu metode dengan metode lainnya. Fleksibilitas yang diberikan oleh Standar Akuntansi Keuangan akan memberikan kemudahan bagi manajemen dalam melakukan manajemen laba.

“Teknik-teknik tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan, karena proses penyusunan laporan keuangan di Indonesia didasarkan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 25 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan dan PSAK yang berlaku umum ini memberikan kesempatan kepada pihak manajemen untuk melakukan dan memilih metode akuntansi yang akan diterapkan dalam perusahaan” (Rahmawati *et al.*, 2006 dalam Yando dan Lubis, 2018).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2018), mendefinisikan “pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti, dan sewa.” Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23 tentang Pendapatan mempunyai tujuan “untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi tertentu. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan manfaat ini dapat diukur dengan andal. Pernyataan ini mengidentifikasi keadaan yang memenuhi kriteria tersebut agar pendapatan dapat diakui. Pernyataan ini juga memberikan pedoman praktis dalam penerapan kriteria tersebut”. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23, “pendapatan harus diakui dengan dasar sebagai berikut:

- (a) bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut;
- (b) royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan; dan
- (c) dalam metode biaya (*cost method*), dividen tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Pada tahun 2017, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. PSAK 72 ini akan menjadi standar tunggal yang mengatur mengenai pengakuan pendapatan dan secara resmi menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan yang ada saat ini, yaitu PSAK 23 mengenai Pendapatan, PSAK 34 mengenai Kontrak Konstruksi, PSAK 44 mengenai Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat, ISAK 10 mengenai Program Loyalitas Pelanggan, ISAK 21 mengenai Perjanjian Konstruksi Real Estat, dan ISAK 27 mengenai Pengalihan Aset dari Pelanggan. PSAK 72 akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020, namun penerapan dini untuk PSAK ini diperbolehkan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan mempunyai tujuan “untuk menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Prinsip utama pernyataan ini adalah bahwa entitas mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa tersebut” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

“Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pengeluaran atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan pada ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). “Definisi beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang biasa. Beban diakui dalam laporan laba rugi ketika penurunan manfaat ekonomik masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti

pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan liabilitas atau penurunan aset. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan perolehan pos penghasilan tertentu. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (*matching of costs with revenues*) ini melibatkan pengakuan pendapatan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa meliputi, sebagai contoh, beban pokok penjualan, gaji, dan penyusutan. Beban biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan, dan aset tetap” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Menurut Sulistyanto (2008) dalam Adryanti (2019), “akrual merupakan selisih antara kas masuk bersih dari hasil operasi perusahaan dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba-rugi. Perhitungan akrual diawali dengan perhitungan total akrual. Total akrual adalah selisih antara laba dan arus kas berasal dari aktivitas operasi. Total akrual dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu (1) bagian akrual yang memang sewajarnya ada dalam proses penyusunan laporan keuangan, disebut *non-discretionary accruals*, dan (2) bagian akrual yang merupakan manipulasi data akuntansi yang disebut *discretionary accruals*. *Discretionary accruals* yang merupakan akrual yang ditentukan oleh manajemen karena manajemen dapat memilih kebijakan dalam hal metode akuntansi dan estimasi akuntansi. Disinilah kelemahan dari dasar akrual yang menimbulkan peluang untuk manajer dalam melakukan praktik laba dengan tujuan tertentu”.

“Manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan mengukur *discretionary accruals* dan dihitung menggunakan Model Jones Dimofikasi” (Pratiwi dan Diana, 2018). Model Jones adalah model pendeteksi manajemen laba pertama yang diperkenalkan Jones (1991) yang selanjutnya dikembangkan oleh Dechow *et al.*, (1995) yang dikenal dengan *Modified Jones Model*. “Rumus yang digunakan untuk menghitung manajemen laba dengan metode *discretionary accruals*

menurut Sulistyanto (2008) dalam Agustia dan Suryani (2018) adalah sebagai berikut:

1) Menentukan nilai total akrual (TAC):

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it} \quad (2.1)$$

Keterangan:

TAC_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

NI_{it} = *Net Income* perusahaan i pada tahun t

CFO_{it} = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i tahun t

2) Total akrual yang diestimasi dengan persamaan regresi *Ordinary Least Square* (*OLS*):

$$\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + e \quad (2.2)$$

Keterangan:

TAC_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

A_{it-1} = Total aset perusahaan i pada t-1

ΔREV_{it} = Perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun t

PPE_{it} = *Property, plant, and equipment* perusahaan i pada tahun t

3) Menghitung *non-discretionary accruals* ($NDAC$) sebagai berikut:

$$NDAC_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) \quad (2.3)$$

Keterangan:

$NDAC_{it}$ = *Non-discretionary accruals* perusahaan i pada tahun t

ΔREC_{it} = Perubahan piutang perusahaan i pada tahun t

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

4) Dengan menggunakan koefisien regresi diatas nilai *Discretionary Accruals* (*DAC*) dapat dihitung dengan rumus:

$$DAC_{it} = \frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it} \quad (2.4)$$

Keterangan:

DAC_{it} = *Discretionary Accruals* perusahaan i pada tahun t”

2.7 Profitabilitas

Menurut Weygandt *et al.*, (2019), defnisi rasio profitabilitas adalah “*measures of the income or operating success of a company for a given period of time*”, artinya “mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi perusahaan untuk jangka waktu tertentu”. “Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan menggunakan *Return on Assets (ROA)*. *ROA* merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan melalui penggunaan aset yang dimiliki” (Chelindiva dan Osesoga, 2020). Menurut Weygandt *et al.*, (2019), “rasio profitabilitas terdiri dari:

a. *Profit Margin*

Profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur presentase setiap rupiah penjualan yang menghasilkan laba bersih.

b. *Asset Turnover*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan.

c. *Return on Assets*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas atas aset.

d. *Return on Ordinary Shareholders Equity*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan berapa banyak rupiah dari laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap rupiah yang diinvestasikan oleh pemilik.

e. *Earnings per Share*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur pendapatan bersih yang diperoleh pada setiap saham biasa.

f. *Price Earnings Ratio*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur harga pasar dari setiap saham biasa terhadap laba per saham.

g. *Payout Ratio*

Payout ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur presentase laba yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai”.

“Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan menggunakan *Return on Assets (ROA)*. *ROA* merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan melalui penggunaan aset yang dimiliki” (Chelindiva dan Osesoga, 2020). Menurut Weygandt *et al.*, (2019), “*ROA* dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return On Assests (ROA)} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average Total Assets}} \quad (2.5)$$

Keterangan:

ROA = *Return on Assets*

Net Income = Laba bersih perusahaan

Average Total Assets = Rata-rata total aset yang dimiliki perusahaan yang diperoleh dengan menjumlahkan total aset periode

berjalan dengan total aset periode sebelumnya lalu dibagi dua”

Menurut Weygandt *et al.*, (2019), “*net income* (laba bersih) adalah jumlah ketika pendapatan melebihi pengeluaran (beban)”. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), “aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika:

- (a) entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
- (b) entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
- (c) entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
- (d) aset merupakan kas atau setara kas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 2: Laporan Arus Kas), kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk dalam kriteria di atas sebagai aset tidak lancar”. Menurut Weygandt *et al.*, (2019), “aset lancar terdiri dari kas, piutang, investasi jangka pendek, biaya dibayar dimuka, dan persediaan barang dagang”.

2.8 Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba

Menurut Lestari dan Wulandari (2019), “profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka kinerja dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

laba juga tinggi. Ketika profitabilitas yang diperoleh perusahaan kecil pada periode waktu tertentu akan memicu perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan pendapatan yang diperoleh sehingga akan memperlihatkan saham dan mempertahankan investor yang ada”. Sedangkan, menurut Pratiwi dan Diana (2018), “semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, semakin besar juga kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah laba perusahaan, maka semakin kecil juga beban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini dapat memotivasi manajemen untuk melakukan tindakan manajemen laba dengan cara mengecilkan jumlah laba yang dilaporkan”.

Penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2017), Lestari dan Wulandari (2019), Pratiwi dan Diana (2018), dan Chelindiva dan Osesoga (2020) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas yang diukur menggunakan *ROA* berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Berbeda dengan penelitian Agustia dan Suryani (2018), serta Anindya dan Yuyetta (2020), menunjukkan hasil bahwa profitabilitas yang diukur menggunakan *ROA* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesisnya sebagai berikut:

Ha₁: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.9 Ukuran Perusahaan

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan dasar pengukuran antara lain total aset, penjualan dan nilai pasar saham” (Kusumawardhani, 2013 dalam Pratiwi dan Diana, 2018). “Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan

Aset Skala Kecil atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah, di dalam Pasal 1 termuat penjelasan tentang pengkategorian emiten:

1. Emiten dengan Aset Skala Kecil yang selanjutnya disebut Emiten Skala Kecil adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:
 - a. memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan
 - b. tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:
 - 1) pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten dengan aset skala menengah; dan/atau
 - 2) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
2. Emiten dengan Aset Skala Menengah yang selanjutnya disebut Emiten Skala Menengah adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:
 - a. memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan
 - b. tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:
 - 1) pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan/atau
 - 2) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)".

“Pengukuran variabel ini menggunakan nilai logaritma natural dari total aset yaitu dapat dituliskan sebagai berikut (Chelindiva dan Osesoga, 2020):

$$Size = \text{Ln}(\text{Total Aset}) \quad (2.6)$$

Keterangan:

Size = Ukuran Perusahaan

Ln = Logaritma natural

Total aset = Total seluruh yang dimiliki perusahaan *i* pada periode *t*”

Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan mengubah struktur total aset perusahaan menggunakan bentuk logaritma natural total aset. Logaritma natural bertujuan menyederhanakan jumlah aset yang kemungkinan mencapai nominal triliunan rupiah tanpa mengubah proporsi sebenarnya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), “aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas. Menurut Weygandt *et al.*, (2019), “karakteristik umum yang dimiliki oleh setiap aset adalah kemampuan untuk menyediakan layanan dan manfaat di masa depan. Di dalam sebuah perusahaan, layanan dan manfaat ekonomik masa depan tersebut biasanya dihasilkan dalam bentuk penerimaan atau pemasukan kas”. Menurut Weygandt *et al.*, (2019), “klasifikasi aset adalah sebagai berikut:

1. *Current assets* (aset lancar)

Aset lancar adalah kas dan aset lainnya yang perusahaan harapkan dapat dikonversikan ke uang tunai, dijual, atau digunakan selama satu tahun atau dalam siklus operasi”. “Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar (Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, 2018), jika:

- (a) Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
- (b) Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
- (c) Entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
- (d) Aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.”

“Aset lancar pada umumnya terdiri dari:

a. *Cash* (kas atau uang tunai)

Kas adalah sumber daya yang terdiri dari koin, mata uang, cek, wesel, dan *money on hand* atau deposito di bank atau penyimpanan serupa. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dapat dikonversi menjadi sejumlah uang tunai tertentu.

b. *Short-term investments* (investasi jangka pendek)

Short-term investments adalah investasi yang siap dipasarkan dan dimaksudkan untuk dikonversi menjadi uang tunai dalam tahun berikutnya atau dalam siklus operasional, manapun yang lebih lama.

c. *Prepaid expenses* (biaya dibayar di muka)

Perusahaan memasukkan biaya dibayar di muka dalam aset lancar apabila perusahaan akan menerima manfaat (biasanya jasa) dalam kurun waktu satu tahun atau dalam siklus operasional, manapun yang lebih lama. Contoh dari biaya dibayar di muka adalah *supplies*, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan sewa dibayar di muka. Biaya dibayar di muka diakui sebagai beban seiring berjalannya waktu (*passage of time*) seperti sewa dan asuransi atau melalui konsumsi seperti *supplies*. Pengakuan biaya dibayar di muka menjadi

beban dilakukan melalui jurnal penyesuaian. Berikut merupakan contoh jurnal penyesuaian dari *supplies*:

<i>Supplies expense</i>	XXX		
		<i>Supplies</i>	XXX

d. *Receivables* (piutang)

Piutang adalah jumlah yang harus dibayar dari individu dan perusahaan. Piutang adalah klaim yang diharapkan dapat ditagih secara tunai. Pengelolaan piutang adalah kegiatan yang sangat penting bagi setiap perusahaan yang menjual barang atau jasa secara kredit. Pada umumnya, piutang diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:

1) *Accounts receivable*

Adalah jumlah yang terutang dari pelanggan. *Accounts receivable* berasal dari penjualan barang dan jasa. Perusahaan umumnya mengharapkan untuk menagih piutang dalam waktu 30 sampai 60 hari. *Accounts receivable* pada umumnya merupakan jenis piutang paling signifikan dari sebuah perusahaan.

2) *Notes receivable*

Adalah perjanjian tertulis (yang dapat dibuktikan dengan instrumen formal) atas jumlah yang akan diterima oleh perusahaan. *Notes receivable* pada umumnya terdapat penagihan bunga dan memiliki jangka waktu 60-90 hari atau lebih.

3) *Other receivable*

Termasuk piutang non usaha seperti piutang bunga, piutang karyawan, klaim atas pengembalian pajak penghasilan, dan lain-lain”.

Terdapat dua metode pencatatan piutang tak tertagih yaitu:

1) *Direct Write-Off Method*

Adalah metode pencatatan piutang tak tertagih dengan menghapus secara langsung piutang yang benar-benar tidak tertagih dengan jurnal sebagai berikut:

<i>Bad Debt Expense</i>	XXX
<i>Account Receivable</i>	XXX

2) *Allowance Method*

Metode pencatatan piutang tak tertagih dengan cara mengestimasi nilai tidak tertagih di akhir periode dengan jurnal sebagai berikut:

<i>Bad Debt Expense</i>	XXX
<i>Allowance for Doubtful Accounts</i>	XXX

Ketika terdapat piutang yang benar-benar tak tertagih, perusahaan mencatat jurnal sebagai berikut:

<i>Allowance for Doubtful Accounts</i>	XXX
<i>Account Receivable</i>	XXX

e. *Inventories* (persediaan barang dagang)

“Persediaan adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam proses produksi barang yang akan dijual” (Kieso *et al.*, 2018).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) dalam PSAK 14: Persediaan, biaya persediaan terdiri dari:

1) “Biaya pembelian

Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya (selain yang dapat ditagih kembali setelahnya oleh entitas kepada otoritas pajak), biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada

perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon dagang, rabat dan hal serupa lain yang dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.

2) Biaya konversi

Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, seperti biaya tenaga kerja langsung. Termasuk juga alokasi sistematis *overhead* produksi tetap dan variabel yang timbul dalam mengonversi bahan menjadi barang jadi. *Overhead* produksi tetap adalah biaya produksi tidak langsung yang relatif konstan, tanpa memperhatikan volume produksi yang dihasilkan, seperti penyusutan dan pemeliharaan bangunan dan peralatan pabrik, biaya manajemen dan administrasi pabrik. *Overhead* produksi variabel adalah biaya produksi tidak langsung yang berubah secara langsung atau hampir secara langsung, mengikuti perubahan volume produksi, seperti bahan tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung.

3) Biaya lain

Biaya-biaya lain yang termasuk dalam biaya persediaan hanya sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini”.

Terdapat dua sistem pencatatan persediaan yaitu (Weygandt *et al.*, 2019):

1. “Sistem perpetual

Dalam sistem perpetual, perusahaan melakukan pencatatan secara terperinci setiap kali terdapat perolehan dan penjualan persediaan sehingga perusahaan menentukan nilai harga pokok penjualan setiap kali terjadi penjualan.

2. Sistem periodik

Dalam sistem periodik, perusahaan tidak melakukan pencatatan secara terperinci atas persediaan yang dimiliki. Perusahaan menentukan nilai harga pokok penjualan secara periodik di

akhir periode dengan melakukan perhitungan persediaan secara fisik untuk menentukan harga pokok penjualan”.

Dalam melakukan penilaian terhadap persediaan, terdapat empat metode yaitu (Weygandt *et. al.*, 2019):

1) *“Specific Identification*

Dalam metode *specific identification*, perusahaan melakukan perincian atas biaya perolehan dari setiap persediaan secara individu. Pada umumnya metode *specific identification* digunakan ketika perusahaan menjual persediaan yang bersifat berbeda satu dengan yang lain sehingga dapat teridentifikasi dengan jelas dari saat pembelian hingga saat penjualan seperti mobil, piano, dan barang antik.

2) *First-In, First-Out (FIFO)*

Metode *FIFO* mengasumsikan barang yang lebih awal dibeli oleh perusahaan adalah barang yang pertama akan dijual oleh perusahaan. Dalam metode *FIFO*, biaya perolehan persediaan paling awal akan diakui terlebih dahulu dalam menentukan harga pokok penjualan.

3) *Average-Cost*

Metode *average-cost* mengalokasikan harga pokok persediaan yang tersedia untuk dijual dengan menggunakan dasar *weighted-average* dari biaya yang timbul untuk setiap unit persediaan. Metode ini mengasumsikan bahwa seluruh persediaan sama.

4) *Last-In, First-Out (LIFO)*

Metode *LIFO* mengasumsikan barang yang terakhir dibeli oleh perusahaan adalah barang yang pertama akan dijual oleh perusahaan. Dalam metode *LIFO*, biaya perolehan persediaan

paling akhir akan diakui terlebih dahulu dalam menentukan harga pokok penjualan. Metode *LIFO* tidak diperbolehkan untuk dipergunakan dalam *International Financial Reporting Standards (IFRS)*”.

2. *Non-current assets* (aset tidak lancar)

“Aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar” (Kieso, *et al.*, 2018). Aset tidak lancar biasanya terdiri:

a. *Long-term investments* (investasi jangka panjang)

Long-term investments adalah investasi yang tidak siap dipasarkan atau yang manajemen tidak bermaksud untuk mengubahnya menjadi kas dalam tahun atau siklus operasi berikutnya, mana yang lebih lama.

b. *Property, plant, and equipment* (aset tetap)

Property, plant, and equipment adalah aset dengan masa manfaat yang relatif lama yang digunakan perusahaan saat ini dalam menjalankan bisnisnya. Aset-aset ini terdiri dari properti berwujud seperti tanah, gedung, mesin dan peralatan. Dengan pengecualian tanah, perusahaan melakukan depresiasi, atau depleksi pada aset tersebut. Penyusutan adalah praktik mengalokasikan biaya aset ke beberapa tahun. Perusahaan melakukan ini dengan secara sistematis menetapkan sebagian dari biaya aset sebagai beban setiap tahun. Aset yang disusutkan oleh perusahaan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Akumulasi akun penyusutan menunjukkan jumlah total penyusutan yang telah dikeluarkan perusahaan sejauh ini dalam umur aset.

c. *Intangible assets* (aset tidak berwujud)

Intangible assets adalah hak, keistimewaan, dan keunggulan kompetitif yang dihasilkan dari kepemilikan aset berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik. Perusahaan secara berkala menilai aset tidak berwujud dengan umur tidak terbatas (seperti *goodwill*)

untuk dilakukan pengujian terhadap indikasi *impairment* (penurunan nilai).

d. *Other assets* (aset lainnya)

Aset lainnya terdiri dari dana khusus, *property* yang dimiliki untuk dijual, dan kas atau sekuritas yang dibatasi penggunaannya”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2018), “sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

(a) Biaya historis (*historical cost*)

Aset dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

(b) Biaya kini (*current cost*)

Aset dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang seharusnya akan dibayarkan jika aset yang sama atau aset yang setara diperoleh sekarang.

(c) Nilai terealisasi/penyelesaian (*realisable/settlement value*)

Aset dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal.

(d) Nilai kini (*present value*)

Aset dicatat sebesar arus kas masuk neto masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diekspektasikan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal.”

2.10 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

“Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin kecil pengelolaan laba yang dilakukan manajemen, sedangkan semakin kecil ukuran perusahaan, maka semakin besar pengelolaan laba yang dilakukan manajemen” (Siregar dan Utama,

2005) dalam Purnama (2017). Lee & Choi (2002) dalam Purnama (2017) menyatakan dimana perusahaan-perusahaan kecil lebih cenderung melakukan pengelolaan laba dibandingkan perusahaan besar. “Ukuran perusahaan yang memiliki hubungan positif dengan manajemen laba disebabkan oleh perusahaan besar memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan kecil, sehingga memungkinkan dilakukan manajemen laba” (Chelindiva dan Osesoga, 2020). “Perusahaan dengan skala besar cenderung membutuhkan dana yang lebih besar dibandingkan perusahaan dengan skala kecil. Oleh sebab itu, perusahaan dengan ukuran besar umumnya membutuhkan tambahan dana untuk operasionalnya. Kebutuhan dana tersebut dapat diperoleh melalui penerbitan saham baru atau menambah jumlah utang. Untuk mendapatkan dana dari pihak eksternal baik penerbitan saham maupun utang dibutuhkan kepercayaan investor akan pengembalian dana atas investasinya dari perusahaan. Dengan demikian manajemen mungkin melakukan manajemen laba untuk menunjukkan laporan keuangan yang diinginkan untuk mendapat kepercayaan investor” (Saragih, 2017).

Menurut hasil penelitian Lubis dan Suryani (2018), “ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba”. Sedangkan, berdasarkan hasil penelitian Rahdal (2017), dan Purnama (2017), ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian Saragih (2017), dan Agustia dan Suryani (2018), ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

Ha₂: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.11 *Leverage*

“*Leverage* merupakan suatu rasio yang digunakan untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai dengan menggunakan hutang” (Agustia dan

Suryani, 2018). Menurut Weygandt *et al.*, (2019), “terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan pendanaan menggunakan utang yaitu:

- a. Kendali pemegang saham tidak akan berpengaruh karena kreditur tidak memiliki hak suara sehingga pemegang saham dapat mempertahankan kendali atas perusahaan secara penuh.
- b. Beban bunga yang timbul dari utang merupakan biaya pengurang dalam pajak sementara dividen bukan merupakan biaya pengurang pajak.
- c. Walaupun beban bunga yang timbul dari utang dapat mengurangi laba bersih, laba per saham akan menjadi lebih tinggi ketika menggunakan utang karena tidak ada saham tambahan yang diterbitkan.”

Menurut Zutter dan Smart (2018), “terdapat dua jenis umum untuk mengukur *leverage*: mengukur *degree of indebtedness* dan mengukur *ability of service debts*. *Degree of indebtedness* mengukur jumlah relatif dari utang terhadap akun signifikan pada neraca. Dua pengukuran yang umum digunakan untuk mengukur *degree of indebtedness* adalah *debt ratio* dan *debt-to-equity ratio*”.

1. *Debt ratio*

“*Debt ratio* mengukur proporsi aset yang dibiayai oleh kreditur perusahaan” (Zutter dan Smart, 2018).

2. *Debt-to-equity ratio*

“*Debt to equity ratio* mengukur proporsi relatif dari total utang dan ekuitas pemegang saham biasa yang digunakan untuk membiayai total aset perusahaan” (Zutter dan Smart, 2018)

“Tipe kedua yang digunakan untuk mengukur *leverage*, *the ability of service debts* mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran yang dibutuhkan secara terjadwal selama periode utang. Kemampuan perusahaan untuk membayar biaya tertentu diukur dengan menggunakan *coverage ratios*. Dua rasio

yang umum digunakan untuk mengukur *coverage ratios* adalah *time interest earned ratio* dan *fixed-payment coverage ratio*” (Zutter dan Smart, 2018).

1. *Times interest earned ratio*

“*Times interest earned ratio* mengukur kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran bunga kontraktual” (Zutter dan Smart, 2018).

2. *Fixed payment coverage ratio*

“*Fixed payment coverage ratio* mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban pembayaran tetap” (Zutter dan Smart, 2018).

Leverage dihitung dengan menggunakan *debt to equity ratio (DER)*. “*Debt to equity ratio* mengukur proporsi relatif dari total utang dan ekuitas pemegang saham biasa yang digunakan untuk membiayai total aset perusahaan” (Zutter dan Smart, 2018). Menurut Subramanyam (2017), “pengukuran variabel ini menggunakan *Debt to Equity Ratio* dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt To Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}} \quad (2.7)$$

Keterangan:

DER = *Debt to Equity Ratio*

Total Debt = Total kewajiban perusahaan

Total Equity = Total modal”

“Liabilitas merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Menurut Kieso, *et. al.* (2018), “liabilitas dibagi menjadi 2, yaitu:

1. *Current Liabilities*

“Utang yang diharapkan perusahaan dapat dibayar dalam siklus normal operasi perusahaan atau dua belas bulan setelah tanggal laporan keuangan”. “Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika (Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, 2018):

- (a) entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal;
- (b) entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;
- (c) liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
- (d) entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menanggukkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan. Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas, sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut.”

Terdapat beberapa contoh utang jangka pendek yaitu:

- a. *“Accounts payable*
Saldo utang kepada pihak lain atas pembelian barang, persediaan, atau jasa.
- b. *Notes payable*
Merupakan perjanjian tertulis untuk membayarkan sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan.
- c. *Current maturities of long term debt*
Bagian dari obligasi, wesel bayar, dan utang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya.
- d. *Short term obligations expected to be refinanced*

Kewajiban jangka pendek yang diekspektasikan akan dibiayai kembali.

e. *Dividends payable*

Jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai hasil otorisasi dewan direksi.

f. *Customer advances and deposits*

Penerimaan deposit dari pelanggan untuk menjamin kinerja kontrak atau layanan perusahaan atau sebagai jaminan untuk menutupi pembayaran kewajiban masa depan yang diharapkan.

g. *Unearned revenues*

Kewajiban yang timbul akibat perusahaan telah menerima pembayaran terlebih dahulu namun belum melakukan pelaksanaan kewajibannya.

h. *Sales and value-added taxes payable*

Merupakan kewajiban pajak yang timbul akibat transaksi jual dan beli.

i. *Income taxes payable*

Merupakan kewajiban pajak atas penghasilan yang didapat perusahaan.

j. *Employee related liabilities*

Merupakan jumlah yang terutang kepada karyawan untuk gaji atau upah pada akhir periode akuntansi.”

2. *Non-current liabilities*

“Entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk dalam kriteria diatas sebagai liabilitas jangka panjang”(Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Terdapat beberapa contoh liabilitas jangka panjang yaitu:

a. *Bonds Payable*

“Merupakan bentuk dari utang wesel yang berbunga. *Bonds payable* dapat dijual pada nilai par (*issued at par*), di atas nilai par (premium), dan di bawah nilai par (*discount*).

b. *Long term notes payable*

Merupakan utang wesel yang memiliki jangka waktu pelunasan lebih dari satu tahun.

c. *Mortgage payable*

Merupakan sebuah utang jangka panjang yang dijaminan terhadap *real estate*.

d. *Lease liability*

Merupakan kewajiban yang muncul akibat perjanjian kontrak antara pemberi sewa (*lessor* atau pemilik properti) dengan penyewa (*lessee* atau peminjam properti). Terdapat dua jenis leasing yaitu *operating lease* dan *finance lease*. Agar sebuah *leasing* dapat dikategorikan sebagai *finance lease*, *leasing* tersebut harus tidak dapat dibatalkan dan memenuhi satu dari lima pengujian di bawah ini:

1. Terdapat perpindahan kepemilikan aset kepada *lessee* di akhir masa *leasing*;
2. Opsi pembelian aset *leasing* oleh *lessee* memiliki tingkat kemungkinan yang tinggi untuk dilakukan;
3. Periode *leasing* mencakup sebagian besar masa manfaat dari aset *leasing*;
4. *Present value* penjumlahan pembayaran *leasing* dan *guaranteed residual value* sama atau melebihi nilai *fair value* dari aset *leasing*;
5. Aset *leasing* bersifat terspesialisasi penggunaannya sehingga *lessor* tidak memiliki opsi untuk penggunaan alternatif bagi aset *leasing* tersebut di akhir periode *leasing*.

e. *Pension liabilities*

Merupakan kewajiban yang timbul akibat dari pengaturan di mana pemberi kerja memberikan manfaat (pembayaran) kepada pensiunan karyawan untuk layanan yang mereka lakukan selama tahun kerja mereka.”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2018), “sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

(a) Biaya historis (*historical cost*)

Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau dalam keadaan tertentu (sebagai contoh, pajak penghasilan), pada jumlah kas atau setara kas yang diekspektasikan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha yang normal.

(b) Biaya kini (*current cost*)

Liabilitas dicatat sebagai sebesar jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini.

(c) Nilai terealisasi/penyelesaian (*realizable/settlement value*)

Liabilitas dicatat sebesar nilai penyelesaiannya; yaitu, jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang diekspektasikan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

(d) Nilai kini (*present value*)

Liabilitas dicatat sebesar arus kas keluar neto masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diekspektasikan akan diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.”

“Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Menurut Kieso, *et al.*, (2018), “ekuitas terbagi menjadi:

1. *Share capital*: par atau *stated value* dari saham yang diterbitkan. termasuk di dalam saham biasa dan saham preferen.
2. *Share premium*: kelebihan dari jumlah yang dibayarkan atas par atau *stated value*.
3. *Retained earnings*: penghasilan perusahaan yang tidak didistribusikan.
4. *Accumulated other comprehensive income*: jumlah akumulasi dari item pendapatan komprehensif lainnya.
5. *Treasury shares*: jumlah saham biasa yang dibeli kembali.
6. *Non-controlling interest (minority interest)*: bagian ekuitas perusahaan anak yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor”.

2.12 Pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Laba

Menurut Fandriani dan Tunjung (2019), “biasanya perusahaan akan melaporkan laba yang lebih tinggi, untuk menjaga reputasi perusahaan di mata publik. Hal ini dilakukan karena rasio *leverage* yang tinggi umumnya sulit untuk memperoleh dana tambahan dari eksternal, karena pihak eksternal akan menilai bahwa perusahaan akan terancam mengalami kegagalan pembayaran utang”. Sejalan dengan *positive accounting theory* yang menyatakan bahwa dalam banyak perjanjian utang, debitor dipersyaratkan oleh kreditur untuk mempertahankan rasio *debt to equity* selama masa perjanjian, oleh karena itu manajer perusahaan yang memiliki rasio *leverage* yang besar cenderung akan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode sekarang, karena hal tersebut akan memberikan perusahaan *leverage ratio* yang kecil. Artinya, *leverage* akan mendorong terjadinya praktik manajemen laba karena adanya kebutuhan manajemen terhadap *debt to equity ratio* tertentu (Priharta, *et al.*, 2018).

Menurut hasil penelitian Priharta, *et al.*, (2018), menunjukkan hasil bahwa *leverage* yang diukur menggunakan *DER* berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Dewi dan Wirawati (2019), *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian Kodriyah dan Fitri (2017), *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

Ha: *Leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

2.13 Kualitas Audit

Menurut Elder, Randal J *et al.*, (2019), menyatakan “audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan”. Menurut Elder, Randal J *et al.*, (2019), “terdapat tiga klasifikasi tujuan audit apabila dibagi berdasarkan asersi yang ingin diuji oleh auditor, yaitu:

1. Terkait Transaksi
 - a. *Occurrence* adalah asersi yang menyatakan apakah transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan benar-benar terjadi selama proses akuntansi.
 - b. *Completeness* adalah asersi yang menyatakan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah disertakan seluruhnya.
 - c. *Accuracy* adalah asersi yang menyatakan apakah transaksi telah dicatat dalam jumlah yang benar.
 - d. *Classification* adalah asersi yang memastikan apakah transaksi yang terjadi telah dicatat dalam akun yang sesuai.
 - e. *Cut-Off* adalah asersi yang memastikan apakah transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang tepat.

2. Terkait Saldo

- a. *Existence* adalah asersi yang digunakan untuk memastikan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan yang tercatat dalam neraca benar-benar ada pada tanggal neraca tersebut.
- b. *Completeness* adalah asersi yang memastikan apakah semua akun dan jumlah yang harus disajikan dalam laporan keuangan disertakan seluruhnya.
- c. *Valuation and Allocation* adalah asersi yang memastikan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas telah dimasukkan pada laporan keuangan pada jumlah yang tepat termasuk penyesuaian nilai yang mencerminkan jumlah aset pada nilai wajar atau nilai realisasi bersih.
- d. *Right and Obligation* adalah asersi yang memastikan apakah aset dan liabilitas yang tercatat merupakan hak dan kewajiban entitas pada tanggal tersebut.

3. Terkait Pengungkapan

- a. *Occurrence and Right and Obligation* adalah asersi yang memastikan apakah peristiwa yang diungkapkan telah terjadi dan merupakan hak dan kewajiban entitas.
- b. *Completeness* adalah asersi yang memastikan apakah semua pengungkapan yang diperlukan telah dimasukkan dalam laporan keuangan.
- c. *Accuracy and Valuation* adalah asersi yang memastikan apakah informasi keuangan yang diungkapkan sudah benar dan pada jumlah yang tepat.”

Untuk memenuhi tujuan audit tersebut, auditor harus memperoleh kualitas dan jumlah bukti yang memadai. Auditor harus menentukan jenis dan jumlah bukti yang diperlukan dan mengevaluasi informasi tersebut sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Menurut Elder, Randal J. *et al.*, (2019), “bukti audit adalah informasi

yang digunakan oleh auditor untuk menentukan informasi yang sedang diaudit yang dinyatakan dengan kriteria yang ditetapkan.” Menurut SA 500 mengenai bukti audit terdapat 7 jenis bukti audit, yaitu:

1. “Inspeksi, mencakup pemeriksaan atas catatan atau dokumen, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lain, atau pemeriksaan fisik atas suatu aset.
2. Observasi, terdiri dari melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Observasi memberikan bukti audit tentang pelaksanaan suatu proses atau prosedur, namun hanya terbatas pada titik waktu tertentu pada saat observasi dilaksanakan dan fakta bahwa adanya observasi atas aktivitas tersebut dapat memengaruhi bagaimana proses atau prosedur tersebut dilaksanakan.
3. Konfirmasi eksternal, merupakan bukti audit yang diperoleh auditor sebagai respons langsung tertulis dari pihak ketiga (pihak yang mengonfirmasi), dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lain.
4. Penghitungan ulang, terdiri dari pengecekan akurasi penghitungan matematis dalam dokumen atau catatan. Penghitungan ulang dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik.
5. Pelaksanaan kembali, pelaksanaan prosedur atau pengendalian secara independen oleh auditor yang semula merupakan bagian pengendalian intern entitas.
6. Prosedur analitis, terdiri dari pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan data non keuangan. Prosedur analitis juga meliputi investigasi antara satu informasi dengan informasi lainnya atau data keuangan yang menyimpang secara signifikan dari jumlah yang telah diprediksi sebelumnya.

7. Permintaan keterangan, terdiri dari pencarian informasi atas orang yang memiliki pengetahuan, baik keuangan maupun non keuangan, di dalam atau di luar entitas. Permintaan keterangan digunakan secara luas sepanjang audit sebagai tambahan untuk prosedur audit lainnya”.

Menurut Pramaswaradana dan Astika (2017), “kualitas audit berkaitan dengan beberapa faktor seperti *audit tenure*, *audit fee*, rotasi auditor, spesialisasi auditor, dan umur publikasi. *Audit tenure* atau masa perikatan audit dapat mempengaruhi kualitas audit. Apabila masa perikatan yang dilakukan dalam waktu lama akan membuat kedekatan yang berlebihan antara klien dan auditor sehingga independensi dan objektivitas auditor nantinya akan menurun, pemberian imbalan jasa atau *fee* sesuai keinginan dapat memotivasi auditor untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengaudit laporan perusahaan (Maharani, 2014 dalam Pramaswaradana dan Astika, 2017). Apabila perusahaan klien semakin cepat melakukan rotasi maka akan dapat mengurangi dan mencegah klien berhubungan dekat dengan auditor tersebut sehingga auditor pun tidak akan mengalami masalah independensi. Spesialisasi auditor pada suatu industri membuat auditor memiliki suatu pengalaman dan pengetahuan yang cukup tentang kondisi perusahaan (Fitriany, 2011 dalam Pramaswaradana dan Astika, 2017). Semakin lama umur perusahaan dipublikasikan, perusahaan tersebut dianggap memiliki kualitas dan manajemen yang bagus. Manajemen dianggap mampu mengelola keuangan secara efektif dan efisien serta mampu menyediakan informasi keuangan dengan benar.

“Tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku” (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2021). Menurut Arens, Elder, & Beasley (2019), terdapat 3 jenis audit, yaitu:

1. *Operational Audit*

“Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari prosedur dan metode yang dijalankan dalam kegiatan operasional perusahaan. Pada penyelesaian audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk meningkatkan operasi.

2. *Compliance Audit*

Audit kepatuhan adalah audit yang dilakukan untuk memastikan bahwa pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau peraturan khusus yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.

3. *Financial Statement*

Audit merupakan audit mengenai informasi akuntansi keuangan perusahaan untuk memastikan laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar yang berlaku”.

Menurut Elder, Randal J *et al.*, (2019), proses audit terdiri dari empat tahap yaitu:

1. Merencanakan dan mendesain pendekatan audit

“Hal yang dilakukan dalam tahap ini adalah perancangan rencana awal, pemahaman bisnis klien, mengestimasi risiko bisnis klien, pelaksanaan prosedur analitis awal, penetapan materialitas, risiko audit dan risiko inheren, serta pemahaman pengendalian internal dan pengumpulan informasi.

2. Melaksanakan uji pengendalian dan keterjadian transaksi

Tahap ini dilakukan untuk mengurangi risiko pengendalian (*control risk*). Auditor akan melakukan evaluasi terhadap pencatatan transaksi klien dengan memverifikasi jumlah transaksi (*substantive test of transaction*).

3. Melaksanakan prosedur analitis dan uji rincian saldo

Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan bukti terkait dengan keterjadian transaksi dan mengetahui apabila terdapat salah saji material dalam saldo laporan keuangan.

4. Melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit

Auditor mengumpulkan temuan audit, mengevaluasi hasil, dan mengeluarkan opini audit.”

Menurut Standar Audit (SA) 700, terdapat 2 bentuk opini audit, yaitu opini tanpa modifikasian dan opini modifikasian. “Auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasian bila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Jika auditor menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material atau tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, auditor harus memodifikasi opininya dalam laporan auditor.”

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Standar Audit “(SA)” 705 mengenai modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen, “opini modifikasian terbagai menjadi 3 bentuk, yaitu:

1. Opini Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap

laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material tetapi tidak pervasif. Pervasif adalah suatu istilah yang digunakan dalam konteks kesalahan penyajian untuk menggambarkan dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan atau kemungkinan dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan, jika ada, yang tidak dapat terdeteksi karena ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dampak yang pervasif terhadap laporan keuangan adalah dampak yang menurut pertimbangan auditor tidak terbatas pada unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan (SA 700, 2021).

2. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

3. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika dalam kondisi yang sangat jarang yang melibatkan banyak ketidakpastian, auditor menyimpulkan bahwa, meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut, auditor tidak dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang potensial dari ketidakpastian tersebut dan kemungkinan dampak kumulatif dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan.”

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2011) dalam Kusumawardani dan Riduwan (2017), “kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Deteksi salah saji

Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat mendeteksi salah saji yang material pada laporan keuangan. Mendeteksi salah saji material dipengaruhi oleh seberapa baik tim audit melakukan audit, yang dipengaruhi oleh sistem pengendalian kualitas dan sumber daya manajemen Kantor Akuntan Publik.

2. Berpedoman pada standar

Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa *auditing*, atestasi, *review*, kompilasi, konsultan manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

3. Komitmen yang kuat terhadap jasa audit yang diberikan kepada klien

Klien membutuhkan jasa audit dari auditor, sebagai auditor maka harus mampu dan dapat memenuhi kebutuhan jasa untuk klien. Komitmen yang kuat dari auditor terhadap jasa audit yang diberikan direspon dengan baik oleh klien.

4. Prinsip kehati-hatian

Para ahli mengindikasikan integritas individual yang ditugaskan dalam perikatan sebagai faktor dalam mendeteksi salah saji material. Auditor sebaiknya memberikan perhatian dan berhati-hati kepada semua aspek dari audit, termasuk evaluasi resiko audit, formulasi dan tujuan audit, menetapkan *scope* atau luas dan tanggung jawab audit, seleksi uji audit, dan evaluasi hasil audit. Sehingga auditor perlu bersikap hati-hati dan mengacu pada standar profesional. Apabila auditor menerapkan prinsip

kehati-hatian dalam semua aspek audit maka hal ini akan meningkatkan hasil audit.

5. Review dan pengendalian oleh supervisor

Para ahli juga mengaitkan kualitas tinggi dengan perusahaan yang memiliki kontrol yang kuat ditempat selama proses audit. SPAP mensyaratkan perusahaan untuk mempertahankan kualitas sistem pengendalian dan membutuhkan auditor untuk merencanakan audit yang memadai. Perusahaan dengan kualitas sistem pengendalian yang lebih baik dan proses metodologi audit yang lebih sistematis cenderung memiliki salah saji material yang tidak terdeteksi oleh prosedur audit mereka.

6. Perhatian yang diberikan oleh manajer dan patner

Para ahli melaporkan bahwa perhatian manajer dan patner untuk keterlibatan yang terkait dengan kualitas audit. SPAP mensyaratkan bahwa audit harus disupervisi dengan cukup. Perhatian manajer dan patner yang memadai mulai saat perencanaan audit sampai dengan pelaporan audit akan memberikan jaminan bahwa semua aspek-aspek harus dilakukan dalam mencapai audit yang berkualitas akan dipenuhi oleh auditor.”

Penggunaan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai proksi dari kualitas audit menurut Fandriani dan Tunjung (2019) dikarenakan tingginya kualitas audit yang dihasilkan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap laporan keuangan perusahaan. Auditor diyakini mampu dalam mendeteksi kesalahan-kesalahan lebih baik, sehingga meningkatkan efisiensi penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah diaudit diharapkan mampu menurunkan praktik manajemen laba pada perusahaan. “KAP *Big Four* diasumsikan melakukan audit yang lebih berkualitas dikarenakan auditor yang bekerja di KAP *Big Four* pada umumnya memiliki lebih banyak pengalaman dalam mengaudit klien dari berbagai macam jenis industri. Selain itu, auditor di KAP *Big Four* telah menjalani training lebih banyak dan memiliki pemahaman

mendalam terhadap suatu industri (spesialisasi), sehingga diasumsikan auditor lebih cakap dalam melakukan audit dan menemukan penyimpangan yang terdapat di laporan keuangan klien. Klien cenderung menjadi lebih berhati-hati dan transparan dalam menyusun laporan keuangannya sehingga kecil kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba” (Pratiwi dan Diana, 2018).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik dinyatakan bahwa “Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah mendapat izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini”. Selanjutnya “akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Lalu dalam Pasal 3, “Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi:

- a. jasa audit atas informasi keuangan historis;
- b. jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan
- c. jasa asurans lainnya.

“*Fee* audit merupakan *fee* yang diterima oleh akuntan publik setelah melaksanakan jasa auditnya, besarnya tergantung dari resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan” (Andriani dan Nursiam, 2017). Menurut Kusumawardani dan Riduwan (2017), “penetapan jasa audit yang dilakukan oleh KAP biasanya didasari oleh perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya tenaga yaitu manager, superpiser, auditor junior dan auditor senior. Sedangkan biaya tidak langsung seperti percetakan, biaya penyusutan komputer, gedung dan asuransi. Berdasarkan keputusan ketua umum institut akuntan publik Indonesia No: kep.024/IAP/VI/2008 bahwa dalam

menetapkan *fee* audit, akuntan publik harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebutuhan klien
2. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum
3. Independensi
4. Tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan
5. Banyaknya waktu yang diperlukan secara efektif digunakan oleh akuntan publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan
6. Basis penetapan *fee* yang disepakati”

2.14 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba

Menurut Fandriani dan Tunjung (2019), “audit yang berkualitas mampu mengurangi praktik manajemen laba. Hal ini karena laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *Big Four* mampu memberikan jaminan kualitas audit yang lebih baik sehingga mencegah perusahaan dalam melakukan manajemen laba”. Purwanti (2012) dalam Pratiwi dan Diana (2018) menyatakan bahwa “auditor berkualitas tinggi lebih memilih untuk melaporkan kesalahan dan penyimpangan dan tidak mau menerima praktik akuntansi yang menimbulkan pertanyaan, sehingga auditor yang berkualitas akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendeteksi manajemen laba. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas audit adalah *fee* audit”. “Dalam hal ini, diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan *fee* audit yang lebih tinggi pula. *Fee* audit merupakan *fee* yang diterima oleh akuntan publik setelah melaksanakan jasa auditnya, besarnya tergantung dari resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan” (Andriani dan Nursiam, 2017).

Menurut hasil penelitian Aryanti, *et al.*, (2017), Faranita dan Darsono (2017) dan Rahmawati, *et al.*, (2017) menunjukkan hasil bahwa kualitas audit yang diukur menggunakan ukuran KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Fandriani dan Tunjung (2019), serta Priharta, *et al.*, (2018), kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ha: Kualitas Audit berpengaruh negatif pada manajemen laba.

2.15 Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Kualitas Audit secara simultan terhadap Manajemen Laba

Menurut Lestari dan Wulandari (2019), “profitabilitas suatu perusahaan dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka kinerja dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga tinggi. Ketika profitabilitas yang diperoleh perusahaan kecil pada periode waktu tertentu akan memicu perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan pendapatan yang diperoleh sehingga akan memperlihatkan saham dan mempertahankan investor yang ada”. Selain profitabilitas, ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi manajemen laba. “Perusahaan dengan skala besar cenderung membutuhkan dana yang lebih besar dibandingkan perusahaan dengan skala kecil. Oleh sebab itu, perusahaan dengan ukuran besar umumnya membutuhkan tambahan dana untuk operasionalnya. Kebutuhan dana tersebut dapat diperoleh melalui penerbitan saham baru atau menambah jumlah utang. Untuk mendapatkan dana dari pihak eksternal baik penerbitan saham maupun utang dibutuhkan kepercayaan investor akan pengembalian dana atas investasinya dari perusahaan. Dengan demikian manajemen mungkin melakukan manajemen laba untuk menunjukkan laporan keuangan yang diinginkan untuk mendapat kepercayaan investor” (Saragih, 2017). Berdasarkan hasil penelitian Agustia dan Suryani (2018), menunjukkan

bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil penelitian Fandriani dan Tunjung (2019), menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan kualitas audit berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi manajemen laba adalah *leverage*. Menurut Gunawan *et al.*, (2015) dalam Dewi dan Wirawati (2019), “semakin besar hutang perusahaan maka semakin besar pula resiko yang dihadapi pemilik sehingga pemilik akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi agar perusahaan tersebut tidak terancam di likuidasi. Jika suatu perusahaan terancam di likuidasi maka yang dapat dilakukan adalah manajemen laba”. Selain *leverage*, kualitas audit juga dapat mempengaruhi manajemen laba. “Tingginya kualitas audit yang diahsilkan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap laporan keuangan perusahaan. Auditor diyakini mampu dalam mendeteksi kesalahan-kesalahan lebih baik, sehingga meningkatkan efisiensi penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah diaudit diharapkan mampu menurunkan praktik manajemen laba pada perusahaan” (Fandriani dan Tunjung, 2019). Berdasarkan penelitian Annisa dan Hapsoro (2017), diperoleh hasil bahwa kualitas audit, *leverage* dan *growth* berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba.

2.16 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan sebagai berikut:

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

Gambar 2.1 Model Penelitian

